

Pengantar

Sebagaimana dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). LPPD ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan (IKK) yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2019.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban telah menyusun Bahan LPPD Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM, PTSP & TK Kabupaten Tuban, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Tuban, Februari 2020
Kepala DPM, PTSP & Tenaga Kerja
Kabupaten Tuban

TADJUDIN TEBYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600827 198603 1 013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 32 Tuban. DPM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantu.

1.2 TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan tenaga kerja serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Bupati di atas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang penanaman modal, perizinan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta bidang hubungan industrial;
- e. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- g. perumusan inovasi terkait tugas fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pembinaan terhadap Tim Teknis dan kelompok jabatan fungsional;

- i. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 terdiri dari jabatan sebagai berikut:

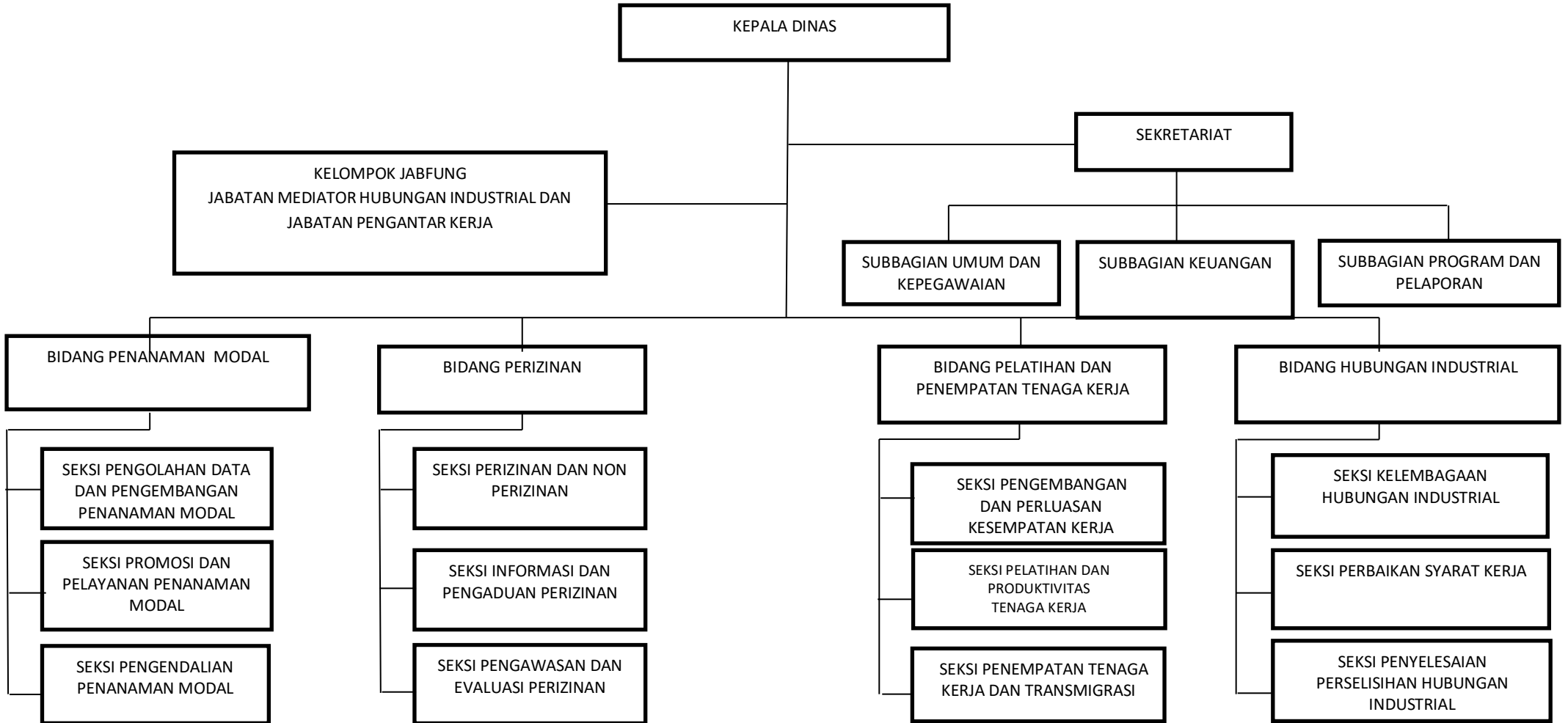
- a. 1 (satu) Kepala Dinas;
- b. 1 (Satu) Sekretaris;
- c. 4 (empat) Kepala Bidang;
- d. 12 (dua belas) Kepala Seksi;
- e. 2 (dua) Jabatan Fungsional;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, secara lengkap yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TUBAN



1.3 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi yang sampai akhir tahun 2019 berjumlah 28 orang. Pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari laki – laki 17 orang (60,71%) perempuan 11 orang (39,28%), Jumlah Jabatan yang ada sebanyak 21 orang dan jabatan yang terisi 20 orang, pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sebanyak 8 orang dan pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan 7 orang. Dilihat dari segi pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban sangat memadai untuk melaksanakan tugas, sebagaimana rincian tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM, PTSP & TK
Kabupaten Tuban
Tahun 2019

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	SLTP	0	0%
2	SLTA	4	14,28%
3	DIPLOMA III/ D-3	1	3,50%
4	STRATA 1	16	57,14%
5	STRATA 2	7	25,00%
6	STRATA 3	0	0%
	JUMLAH	28	100,00%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPM, PTSP & TK Kab. Tuban

Selanjutnya pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM, PTSP & TK Kab. Tuban
Tahun 2019

NO.	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	7	25,00%
3	Golongan III	13	46,42%
4	Golongan IV	8	28,57%
	JUMLAH	28	100,00%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian DPM, PTSP & TK Kab. Tuban

1.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) DPM,PTSP dan TK

Berikut beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban diantaranya sebagai berikut :

- Tanda Daftar Gudang
- Izin Pemasangan Reklame Komersial
- Izin Penyelenggaraan Klinik
- Izin Rumah Sakit
- Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika
- Izin Laboratorium Klinik Pratama
- Izin Optikal
- Izin Apotek
- Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Persetujuan Site Plan
- Surat Keterangan Tata Ruang
- Izin Trayek Angkutan Pedesaan / Angkutan Kota
- Izin Puskesmas
- Rekomendasi Andalalin
- Izin Survei / Riset / PKL / KKN

1.5 RENCANA STRATEGIS

Dalam perencanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahun ke depan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja melakukan indentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi. Permasalahan yang teridentifikasi ini merupakan salah satu tolok ukur dalam menyusun perencanaan 5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya promosi investasi;
2. Belum optimalnya sistem informasi pelayanan perizinan;
3. Belum optimalnya standar pelayanan penerbitan perizinan;
4. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan perizinan;
5. Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat;
6. Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja dalam upaya penempatan tenaga kerja;
7. Belum optimalnya hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya.

Maksud penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah DPM, PTSP dan Naker Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 untuk memberikan arahan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan, dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah :

- a. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pelayanan OPD di Bidang Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
- b. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun yang merupakan pedoman dalam pencapaian visi Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja (2016-2021) melalui sumber pembiayaan APBD
- c. Sebagai Instrumen Pengukuran Kinerja OPD.

a. VISI

Berdasarkan kondisi masyarakat saat ini, permasalahan dan tantangan yang di hadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis maupun potensi yang di miliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta pemerintah daerah, maka Visi kabupaten Tuban untuk jangka waktu 2016-2021 kedepan adalah:

“Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.”

Pada visi tersebut terdapat 4 kata kunci yaitu **religius, bersih, maju dan sejahtera**. Penggunaan kata lebih pada visi tersebut diatas merupakan upaya untuk meningkatkan suatu keadaan yang lebih baik, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. **Religius**, yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
2. **Bersih**, secara perwujudan tata pemerintahan yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan **satisfied public services** (layanan public yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti.
3. **Maju**, ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

4. **Sejahtera**, adalah keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan minimalnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dalam situasi lingkungan yang aman dan damai.

b. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi pemerintah Kabupaten Tuban adalah:

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan ruang guna mendorong kemajuan daerah
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan

Dari kelima Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban sebagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan perizinan termasuk di dalam Misi kedua yaitu "Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih." Dan Misi Keempat "Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif."

Pada misi kedua yaitu "Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih" program prioritas yang diusung dan terkait dengan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah :

1. Implementasi E-government ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM Aparatur
3. Peningkatan kreativitas dan inovasi aparatur untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik

Sedangkan pada misi keempat “Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif” program prioritas yang diusung dan yang terkait dengan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja adalah :

1. Peningkatan kinerja investasi dan pelayanan perizinan penanaman modal melalui PTSP.

Berdasarkan kedua misi tersebut maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban wajib untuk melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat secara bersih dan transparan. Untuk itu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban mengusung motto pelayanan yaitu **“Melayani Sepenuh ARTI (Akuntabel, Ramah, Transparan, Ikhlas).”** Sedangkan sebagai fungsi penyelenggaraan penanaman modal di daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dipacu kinerjanya agar dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Tuban yang mana peningkatan jumlah investasi akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di mana diharapkan tenaga kerja yang terisi merupakan masyarakat Kabupaten Tuban sendiri sehingga dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat.

Dalam upaya-upaya melaksanakan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan, sasaran serta indikator sasaran sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
dengan RPJMD Kabupaten Tuban

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
“Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera.”	Misi 2 : Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai AKIP Kabupaten Tuban
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai IKM pelayanan publik Pemerintah Daerah

	Misi 4 : Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif	Peningkatan ekonomi lokal yang kuat melalui peningkatan produksi dan olahan hasil pertanian, perikanan, potensi keunggulan lokal yang berdaya saing tinggi, serta peningkatan sistem jaringan distribusi untuk pemerataan hasil pembangunan dan penyediaan lapangan kerja	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi unggulan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan hasil produksi pertanian dan perikanan, penguatan kelembagaan koperasi, industri dan perdagangan, dan badan usaha lainnya, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi dalam rangka penyerapan tenaga kerja	Tingkat Kesempatan Kerja (%)
--	--	---	--	------------------------------

Sumber : RPJMD Kabupaten Tuban, 2016 – 2021

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN DPM,PTSP DAN TK

2.1 Program

Program adalah kumpulan sejumlah kegiatan yang memiliki atau mengandung kesamaan perspektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019 ada 8 program adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan.
5. Program Transmigrasi Regional
6. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
8. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Anggaran yang disediakan oleh APBD Kabupaten Tuban Tahun 2019 untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Program dan Anggaran DPM,PTS & TK
Kabupaten Tuban
Tahun 2019

No 1	Nama Program 2	Anggaran (Rp) 3	Keterangan 4
1	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	165.936.292	APBD
2	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	137.840.000	APBD
3	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.109.026.500	APBD
4	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	468.568.000	APBD
5	Program Transmigrasi Regional	108.680.000	APBD
6	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	1.087.550.000	APBD
7	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan	463.821.000	APBD
8	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	272.430.000	APBD
JUMLAH		3.813.851.792	APBD

Sumber : DPM,PTSP & TK Kab. Tuban 2019

2.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan. Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kegiatan dan Anggaran DPM,PTS & TK
Kabupaten Tuban
Tahun 2019

No	Nama Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	127.836.292	120.074.054
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38.100.000	35.700.000
3	Koordinasi dan penyusunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah	40.940.000	39.728.250
4	Fasilitas kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	96.900.000	95.791.000
5	Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja	183.051.500	169.999.846
6	Penyiapan Sumberdaya Tenaga Kerja	509.598.000	471.637.636
7	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Ketrampilan Las Listrik bagi pencari kerja (DBHCHT)	416.377.000	411.854.600
8	Fasilitasi Pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial	170.055.500	152.273.540
9	Pembentukan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan	138.179.000	119.823.076
10	Perbaikan syarat kerja	160.333.500	146.776.788
11	Pelayanan Transmigrasi Regional	108.680.000	97.477.400
12	Penyediaan Jasa Perkantoran	285.800.000	254.362.871
13	Penyediaan Peralatan Kantor	231.200.000	189.461.900
14	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	298.000.000	288.369.619
15	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	59.000.000	50.820.000
16	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	213.550.000	206.140.306
17	Penyebarluasan Informasi Perizinan	171.145.000	155.506.214

18	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan terpadu	86.926.000	76.439.116
19	Pengendalian dan Evaluasi Perizinan	205.750.000	190.067.583
20	Fasilitasi, Koordinasi, dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia usaha	61.420.000	60.275.976
21	Promosi potensi Investasi	181.562.000	176.003.952
22	Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	29.448.000	27.711.151
	JUMLAH	3.813.851.792	3.536.294.878

Sumber : DPM,PTSP & TK Kab. Tuban 2019

2.3 Urusan Perizinan

Urusan Perizinan mempunyai peran strategis sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dalam menunjang perkembangan usaha. Guna meningkatkan iklim investasi yang kondusif dalam pembangunan di Kabupaten Tuban diarahkan melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan.

Dalam Urusan Perizinan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp.463.821.000,- dan terealisasi sebesar Rp.422.012.913,- atau 90,99%, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan izin yang terbit sesuai SOP dengan target 100%, dan terealisasi sebesar 100%.
2. Persentase tindak lanjut terhadap hasil pengendalian izin usaha dengan target 70%, terealisasi sebesar 70%.
3. Peningkatan jumlah pemohon izin dengan target 4.000 pemohon izin, terealisasi sebanyak 4.425 pemohon izin.

2.4 Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal mempunyai peran strategis sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui daya tarik investasi dan penyiapan tenaga kerja yang bersaing serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tuban. Urusan Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan dan melaksanakan koordinasi, menyusun program dan petunjuk teknis, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Penanaman Modal.

Dalam Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp.272.430.000,- dan terealisasi sebesar Rp.263.991.079,- atau 96,90%, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah investor yang mendaftar penanaman modal di daerah (PMDN) dengan target sebanyak 8 investor, terealisasi sebanyak 614 investor.

Melonjaknya realisasi jumlah investor di Tahun 2019 yaitu sebanyak 614 investor disebabkan dampak terbitnya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Regulasi yang dimaksud mencabut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, sehingga Izin Prinsip Penanaman Modal dihapus. Target yang ditetapkan dalam Renstra didasarkan pada pelaku usaha yang didaftarkan melalui Izin Prinsip Penanaman Modal (sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban nomor 1 Tahun 2014), dengan penghapusan Izin Prinsip Penanaman Modal pelaku usaha dapat langsung mendaftar melalui Online Single Submission, dan jumlahnya cukup banyak, Namun Bidang Penanaman Modal DPM, PTSP dan Naker Kab. Tuban tetap mengidentifikasi jumlah investor yang mendaftar dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menghitung jumlah indikator kinerja.

2.5 Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan mempunyai peran strategis sebagai koordinator dan fasilitator bidang ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas SDM (pencari kerja, tenaga kerja, hubungan industrial, serta penerapan K3 di perusahaan). Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Tuban diarahkan melalui peningkatan keterampilan (skill), pengetahuan peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan dan tenaga kerja.

Dalam Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 1.686.274.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.569.842.886,- atau 93,09%, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Prosentase besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan dengan target sebesar 71,99%, terealisasi sebesar 71,98%. Tercapainya realisasi kinerja kurang dari target didapatkan dari data jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan data jumlah pencari kerja.
2. Presentase besaran tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi dengan target sebesar 75,72%, terealisasi sebesar 100%.
3. Presentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan dengan target sebesar 64,80%, terealisasi sebesar 100%.
4. Cakupan transmigrasi yang dapat ditempatkan dengan target sebesar 35%, terealisasi sebesar 60%.
5. Prosentase potensi perselisihan Hubungan Industrial yang difindaklanjuti/diselesaikan dengan target 75%, terealisasi sebesar 100%.

6. Besaran peraturan perusahaan (PP) yang disahkan dengan target sebanyak 5 PP, terealisasi sebanyak 5 PP.
7. Besaran perjanjian kerja bersama (PKB) yang didaftarkan dengan target 3 PKB, terealisasi sebanyak 3 PKB.
8. Besaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dicatatkan dengan target 560 peserta, terealisasi sebanyak 1.392 peserta.
9. Besaran LKS Bipartit yang dicatatkan dengan target sebanyak 6 perusahaan, terealisasi sebanyak 2 perusahaan, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari perusahaan akan pentingnya LKS Bipartit.
10. Besaran penerapan Minimum Kabupaten (UMK) dengan target 65%, terealisasi sebesar 67%.

2.6 Urusan Kesekretariatan

Urusan Kesekretariatan mempunyai peran strategis sebagai pendukung teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban. Guna meningkatkan peran tersebut, maka keberhasilan Urusan Kesekretariatan dapat diukur melalui kesejahteraan pegawai, kelancaran proses pendanaan, serta terlaksananya laporan-laporan dokumen kinerja.

Dalam Urusan Kesekretariatan di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp. 1.391.326.292,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.280.448.000,- atau 92,03%, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target 80%, terealisasi sebesar 80%.
2. Prosentase aparatur OPD mematuhi peraturan kedinasan dengan target 80%, terealisasi sebesar 80%.
3. Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja dengan target BB, terealisasi dengan nilai BB.

2.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, memperoleh alokasi anggaran setelah perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 6.886.255.696,- dengan Realisasi Rp. 6.342.103.209,- atau (92,10%) dengan rincian yang terdiri dari Belanja Tidak langsung (BTL) Rp.3.072.403.904,- dengan realisasi Rp. 2.805.808.331,- dan- Belanja langsung (BL) Rp.3.813.851.792,- dengan realisasi Rp. 3.536.294.878-. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Urusan Perizinan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban melalui 8 (delapan) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan, Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

a. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.165.936.292,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 155.774.054,- atau 93,88%

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.127.836.292,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 120.074.054,-atau 93,93%.

2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebesar Rp.38.100.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 35.700.000,-atau 93,70%.

b. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.137.840.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.153.519.250,- atau 98,32%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.40.940.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 39.728.250,- atau 97,04%.

2. Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.96.900.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 95.791.000,- atau 98,86%.

c. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kesempatan Kerja sebesar Rp.1.109.026.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.1.053.492.082,- atau 94,99%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja adalah sebesar Rp.183.051.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.169.999.846,- atau 92,87%.

2. Penyiapan Sumberdaya Tenaga Kerja

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Sumberdaya Tenaga Kerja adalah sebesar Rp.509.598.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 471.637.636,- atau 92,55%.

3. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Ketrampilan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Ketrampilan Las Listrik bagi Pencari Kerja (DBHCHT) adalah sebesar Rp. 416.377.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 411.854.600,- atau 98,91%.

d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Rp.468.568.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 418.873.404,-atau 89,39%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial adalah sebesar Rp.170.055.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.152.273.540,- atau 89,54%

2. Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp.138.179.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.119.823.076,- atau 86,72%.

3. Perbaikan Syarat Kerja

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Syarat Kerja adalah sebesar Rp.160.333.500,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.146.776.788,- atau 91,54%.

e. PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Transmigrasi Regional sebesar Rp.108.680.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.97.477.400,- atau 89,69%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Pelayanan Transmigrasi Regional :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Transmigrasi Regional sebesar Rp.108.680.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.97.477.400,- atau 89,69%.

f. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA ADMINISTRASI PERKANTORAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran sebesar Rp.1.087.550.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.989.154.696,- atau 90,95%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyediaan Jasa Perkantoran :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran sebesar Rp.285.800.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 254.362.871,- atau 89,00%.

2. Penyediaan Peralatan Kantor :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor sebesar Rp.231.200.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.189.461.900,- atau 81,95%.

3. Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran sebesar Rp.298.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.288.369.619,- atau 96,77%.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran sebesar Rp. 59.000.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 50.820.000,- atau 86,14%.

5. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar Rp.213.550.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 206.140.306,- atau 96,53%

g. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan sebesar Rp.463.821.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.422.012.913,- atau 90,99%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyebarluasan Informasi Perizinan :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perizinan sebesar Rp.171.145.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.155.506.214,- atau 90,86%

2. Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp.86.926.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.76.439.116,- atau 87,94%

3. Pengendalian dan Evaluasi Perizinan :

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Perizinan sebesar Rp.205.750.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.190.067.583,- atau 92,38%

h. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi sebesar Rp. 272.430.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 263.991.079,- atau 96,90%.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Fasilitasi, Koordinasi, dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha sebesar Rp. 61.420.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 60.275.976,- atau 98,14%

2. Promosi Potensi Investasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Promosi Potensi Investasi sebesar Rp.181.562.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp.176.003.952,- atau 96,94%

3. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp.29.448.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 27.711.151,- atau 94,10%.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Sedangkan penetapan indikator kinerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, berikut ini Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban pada Tahun 2019 berdasarkan indikator sasaran.

Tabel 2.3
Capaian kinerja pada Tahun 2019 berdasarkan indikator sasaran
DPM,PTSP dan TK Kabupaten Tuban
Tahun 2019

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan						
		Presentase ketepatan waktu dalam menyelesaikan izin yang diterbitkan sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		Presentase tindak lanjut terhadap hasil pengendalian izin usaha (%)	65%	70%	70%	70%	Tercapai
		Peningkatan jumlah pemohon izin	3.850 pemohon izin	4.900 pemohon izin	4.000 pemohon izin	4.425 pemohon izin	Tercapai
	Kegiatan Pelayanan perizinan keliling	Jumlah kedatangan di tiap kecamatan sasaran pelayanan perizinan keliling	140 kali	152 kali			
	Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu						

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Terselenggaranya rapat koordinasi pembahasan permohonan izin dan penanganan pengaduan izin oleh tim teknis	40 kali	40 kali			
		Presentase pemoho ijin yang masuk yang tertangani (Perlu persetujuan tim teknis)			100%	100%	Tercapai
		Jumlah kedatangan di tiap kecamatan perizinan keliling			80 kali	83 kali	Tercapai
	Kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen perizinan	Pembaruan aplikasi untuk 25 jenis perizinan	25 aplikasi	25 aplikasi			
	Kegiatan Sosialisasi dan penyebaran informasi pelayanan perizinan	Jumlah sosialisasi tatap muka, booklet/leaflet, siaran radio dan pemasangan billboard reklame	10 kcmt, 1000 booklet/leaflet, 7x siaran radio, 1 unit billboard reklame	10 kcmt, 1000 booklet/leaflet, 7x siaran radio, 1 unit billboard reklame			
	Kegiatan Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan perizinan	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengendalian	80 kali	76 kali			
	Kegiatan Evaluasi penerapan implementasi penjamin Mutu melalui penerapan	Jumlah pendampingan konsultan dan jumlah dokumen hasil audit tim ISO	1 pendampingan, 1 dokumen	1 pendampingan, 1 dokumen			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	sistem manajemen Mutu ISO 9001 Tahun 2008						
	Kegiatan Pengendalian dan evaluasi perizinan						
		Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemantauan dan pengendalian			450 pelaku usaha	395 pelaku usaha	Belum Tercapai
		Jumlah pendampingan konsultan audit ISO 2015 dan jumlah dokumen hasil audit			1 dokumen	1 dokumen	Tercapai
	Kegiatan Penyebarluasan informasi perizinan						
		Jumlah sosialisasi tatap muka			10 kecamatan	10 kecamatan	Tercapai
		Jumlah booklet/leaflet			1000 booklet/leaflet	1000 booklet/leaflet	Tercapai
		Jumlah siaran radio			7 kali	7 kali	Tercapai
		Jumlah pemasangan billboard reklame			1 unit	1 unit	Tercapai
2	Program promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor yang terjaring dalam pelaksanaan promosi dan kerjasama investasi	6 investor	16 investor			
	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah investor yang mendaftarkan penanaman modal di daerah (PMDN)			8 Investor	614 Investor	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan pameran investasi	3 kali	3 kali			
	Kegiatan Promosi potensi investasi						
		Terlaksananya pameran promosi investasi			3 kali	5 kali	Tercapai
		Investor yang berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban			31% dari total pengunjung	30%	Belum Tercapai
	Kegiatan Fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia usaha	Jumlah koordinasi dan kerjasama yang dilaksanakan	17 kali	31 kali	32 kali	33 kali	Tercapai
	Kegiatan Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen			
	Kegiatan Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pendaftaran penanaman modal yang terealisasi menjadi izin usaha			72%	33,06%	Belum Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program peningkatan kesempatan kerja						
		Prosentase besaran pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan	71,99%	71,99%	71,99%	71,98%	Belum Tercapai
		Prosentase besaran pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	75,72%	75,72%	75,72%	100%	Tercapai
		Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	64,80%	64,80%	64,80%	100%	Tercapai
	Kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja						
		Jumlah pencari kerja yang mengikuti kegiatan penyebaran informasi bursa kerja	300 orang	300 orang			
		Jumlah kecamatan sasaran			6 kecamatan	6 kecamatan	Tercapai
		Jumlah pengunjung dan pencari kerja			2.400 orang	2.506 orang	Tercapai
	Kegiatan Pemeran bursa kerja	Jumlah pengunjung dan pencari kerja	2400 orang	2400 orang			
	Kegiatan Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah masyarakat yang dilatih	152 orang	152 orang			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	melalui pelatihan las dan otomotif						
	Kegiatan Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan las listrik bagi pencari kerja (DBHCHT)	Jumlah tenaga kerja yang dilatih			60 peserta	60 peserta	Tercapai
		Prosentase tenaga kerja yang lulus/memiliki keahlian			80%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan (pelatihan berbasis kewirausahaan)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	80 orang	80 orang			
	Kegiatan Penyiapan sumber daya tenaga kerja						
		Jumlah peserta yang mengikuti kewirausahaan			220 peserta	220 peserta	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pemberian hibah pelatihan menjahit			100 orang	100 orang	Tercapai
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan ekspos pelatihan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen			
	Program pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan	Meningkatkan pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan	90%	100%			
	Kegiatan Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan otomotif (DBHCHT)	Tersedianya tenaga kerja siap pakai	52 orang	52 orang			
4	Program transmigrasi regional						
		Prosentase besaran transmigran yang dapat ditempatkan	30%	11,76%			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cakupan transmigran yang dapat ditempatkan (%)			35%	60%	Tercapai
	Kegiatan Penyuluhan transmigrasi regional	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan transmigrasi	300 orang	300 orang			
	Kegiatan Pelatihan transmigrasi regional	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon transmigrasi regional (KK)	10 KK	10 KK			
	Kegiatan Pemberangkatan transmigrasi regional	Jumlah peserta yang mengikuti pemberangkatan transmigrasi regional (KK)	10 KK	2 KK			
	Kegiatan Pelayanan transmigrasi regional						
		Jumlah peserta penyuluhan transmigrasi			200 peserta	200 peserta	Tercapai
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan calon transmigran			5 KK	3 KK	Belum Tercapai
		Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK)			5 KK	3 KK	Belum Tercapai
5	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan						
		Persentase potensi perselisihan hubungan industrial yang ditindaklanjuti/diselesaikan			75%	100%	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Besaran peraturan perusahaan (PP) yang disahkan	4 PP	5 PP	5 PP	5 PP	Tercapai
		Besaran perjanjian kerja bersama (PKB) yang didaftarkan	2 PKB	2 PKB	3 PKB	3 PKB	Tercapai
		Besaran perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dicatatkan	555 PKWT	1.790 PKB	560 PKWT	1.392 PKWT	Tercapai
		Besaran LKS Bipartit yang dicatatkan	5 LKS bipartit	2 LKS bipartit	6 LKS bipartit	2 LKS bipartit	Belum Tercapai
		Prosentase besaran pengupahan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	60%	60%	65%	67%	Tercapai
	Kegiatan Fasilitasi penetapan dan penerapan Upah Minimum Kabupaten	Tersusunnya usulan UMK tahun 2018 kabupaten tuban	1 usulan	1 usulan			
	Kegiatan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Jumlah peserta sosialisasi UMK (perusahaan)	50 perusahaan	47 perusahaan			
	Kegiatan Bimbingan teknis struktur dan skala upah	Jumlah peserta bimbingan teknis struktur dan skala upah (perusahaan)	100 perusahaan	100 perusahaan			
	Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial						

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah kasus yang diselesaikan	100 perusahaan	100 perusahaan			
		Jumlah perusahaan yang terfasilitasi			100 perusahaan	68 perusahaan	Belum Tercapai
		Jumlah peserta sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan			50 perusahaan	23 perusahaan	Belum Tercapai
		Dokumen laporan monitoring dan evaluasi			1 dokumen	1 dokumen	Tercapai
		Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			30 perusahaan	29 perusahaan	Belum Tercapai
	Kegiatan Peningkatan kepesertaan BPJS sektor pekerja formal dan non formal	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS sektor formal dan non formal (perusahaan)	100 orang/pelaku usaha	100 orang/pelaku usaha			
	Kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan (perusahaan)	50 perusahaan	50 perusahaan			
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi	1 dokumen	1 dokumen			

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pengurangan pekerja anak dalam mendukung PKH	Jumlah pekerja anak yang mengikuti sosialisasi dan fasilitasi pengurangan pekerja anak dalam mendukung PKH	0	0			
	Kegiatan Bimbingan teknis hubungan industrial ketenagakerjaan	Jumlah peserta bimbingan teknis hubungan industrial ketenagakerjaan (perusahaan)	100 perusahaan	100 perusahaan			
	Kegiatan Pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan						
		Jumlah koordinasi LKS Tripartit terkait isu-isu ketenagakerjaan	2 LKS tripartit	2 LKS tripartit			
		Jumlah peserta pembinaan LKS bipartit			50 orang dari 25 perusahaan (25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan pekerja/SP/SB)	45 orang dari 25 perusahaan (25 orang manajemen dan 25 orang perwakilan pekerja/SP/SB)	Belum Tercapai
		Jumlah peserta pembinaan serikat pekerja/serikat buruh			50 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh (2 orang pengurus SP/SB)	44 orang dari 25 serikat pekerja/serikat buruh (2 orang pengurus SP/SB)	Belum Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah koordinasi LKS Tripartit terkait isu-isu ketenagakerjaan			4 kali	4 kali	Tercapai
	Kegiatan Perbaikan syarat kerja						
		Usulan penetapan UMK			1 usulan	1 usulan	Tercapai
		Jumlah peserta sosialisasi UMK			50 perusahaan	48 perusahaan	
		Jumlah peserta bimbingan teknis struktur dan skala upah			50 perusahaan	31 perusahaan	Belum Tercapai
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kepesertaan BPJS sektor formal dan non formal			50 perusahaan	39 perusahaan	Belum Tercapai
		Jumlah peserta bimbingan teknis hubungan industrial ketenagakerjaan			50 perusahaan	47 perusahaan	Belum Tercapai
6	Program peningkatan kinerja administrasi perkantoran	Angka indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	80%	80%	80%	80%	Tercapai
	Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran	Jumlah jasa administrasi perkantoran	9 jenis	9 jenis	11 jenis	11 jenis	Tercapai
	Kegiatan Penyediaan peralatan perkantoran	Jumlah jenis peralatan perkantoran	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Tercapai
	Kegiatan Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	5 jenis	5 jenis	14 jenis	14 jenis	Tercapai
	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	40 kali	40 kali			
		Jumlah dokumen laporan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti			45 dokumen	70 dokumen	Tercapai
7	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase aparatur SKPD mematuhi peraturan kedisiplinan	80%	80%	80%	80%	Tercapai
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	55 stel PDH, 6 stel PSR, 55 atasan batik tradisional	Tercapai
	Kegiatan Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti kompetensi	5 orang	5 orang	Seluruh pegawai	Seluruh pegawai	Tercapai
8	Program peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	B	B	BB	BB (73,52)	Tercapai

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2018	REALISASI KINERJA 2018	TAHUN 2019		
					TARGET KINERJA 2019	REALISASI KINERJA 2019	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen	9 dokumen	9 dokumen	6 dokumen	7 dokumen	Tercapai
	Kegiatan Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah						
		Jumlah dokumen dan jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	9 dokumen	9 dokumen			
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan			9 dokumen	9 dokumen	Tercapai
		Prosentase penyerapan anggaran OPD (%)			95%	92,10%	Belum Tercapai

Sumber:DPM,PTSPdanNakerTahun2019

2.8 Perolehan Penghargaan / Prestasi

Adapun perolehan penghargaan/prestasi urusan Perizinan, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan yang telah diraih pada Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Jenis Penghargaan yang diraih
DPM,PTSP dan TK Kabupaten Tuban
Tahun 2019

No.	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
1.	ISO 9001 : 2015	British Assesment Bureau
2.	Peringkat ke-VI Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 terbaik Prov. Jatim.	Gubernur Jawa Timur
3.	Juara 2 Stand Terbaik pada Pameran Peluang Investasi, Perdagangan Pariwisata dan Produk Unggulan Daerah	Penyelenggara TRADE-VEST EXPO 2019

2.9 SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban yang berlokasi di Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso Nomor 32 Tuban.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban terdiri dari ruangan Kepala Dinas, ruangan Sekretariat, ruangan bidang Penanaman Modal, ruangan bidang Perizinan, ruangan bidang Hubungan Industrial, dan ruangan bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban juga terdapat ruangan rapat sekaligus ruang mediasi, Ruang Front Office (FO), Ruang Back Office (BO), Record Center dan tempat parkir.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban memiliki 4 (Empat) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 17 (Tujuh Belas) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Daftar Kendaraan
DPM, PTSP & TK Kab. Tuban
Tahun 2019

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Mobil	Toyota Inova/GM/T21	Operasional Kepala Dinas
2	Mobil	Toyota / Avanza	Operasional Administrasi
3	Mobil	Toyota / Inova	Operasional Administrasi
4	Mobil	Toyota / Avanza	Operasional Administrasi
5	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CW	Operasional Administrasi
6	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CW	Operasional Administrasi
7	Sepeda Motor	Yamaha / Jupiter Z1 CW	Operasional Administrasi
8	Sepeda Motor	Honda Grand	Operasional Administrasi
9	Sepeda Motor	Honda / Supra	Operasional Administrasi
11	Sepeda Motor	Honda / Win	Operasional Administrasi
12	Sepeda Motor	Honda / Win	Operasional Administrasi
13	Sepeda Motor	Honda / Honda NF125TD	Operasional Administrasi
14	Sepeda Motor	Yamaha / MCW	Operasional Administrasi
15	Sepeda Motor	Honda / Supra X125	Operasional Administrasi
16	Sepeda Motor	Honda /WIN	Operasional Administrasi
17	Sepeda Motor	Honda Supra	Operasional Administrasi
18	Sepeda Motor	Honda Supra	Operasional Administrasi
19	Sepeda Motor	Honda / 125TR	Operasional Administrasi
20	Sepeda Motor	Honda / 125TR	Operasional Administrasi
21	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	Operasional Administrasi

Sumber : Laporan Tahunan Barang Milik DPM, PTSP & Tenaga Kerja Tahun 2019

2.10 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam peningkatan urusan Perizinan, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyampaian informasi pasar kerja dan pembentukan bursa kerja khusus di beberapa sekolah.
- b. Masih banyaknya para pencari kerja yang belum mengikuti pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi
- c. Masih banyak LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Kabupaten Tuban yang belum terakreditasi.
- d. Belum tersebarluasnya informasi kegiatan transmigrasi di masyarakat.
- e. Dengan semakin banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial saat ini, masih kekurangan tenaga fungsional mediator hubungan industrial.

- f. Dengan beralihnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maka wajib ketenagakerjaan di perusahaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 juga beralih ke Provinsi, hal tersebut berakibat pada data perusahaan dan jumlah tenaga kerja perusahaan bukan lagi menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan ke DPM, PTSP dan Naker Kab. Tuban.
- g. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam hubungan industrial yang harmonis dan mewujudkan penerapan K3 di Perusahaan.
- h. Keterbatasan pemohon mengakses aplikasi OSS karena pengetahuan teknologi informasi pemohon yang kurang.
- i. Kurangnya informasi tata cara alur dan persyaratan perizinan di wilayah kecamatan yang jauh dari kota.
- j. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki pemohon untuk mengakses aplikasi perizinan online.
- k. Keterbatasan petugas pelayanan perizinan.
- l. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.
- m. Belum optimalnya promosi investasi.
- n. Belum optimalnya penyampaian LKPM.

2. Solusi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan, antara lain :

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi IPK dan BKK ke sekolah-sekolah kejuruan secara bertahap.
- b. Menambahkan jumlah pelatihan ketenagakerjaan berbasis kompetensi.
- c. Mengadakan sosialisasi dan fasilitasi kepada LPK yang belum terakreditasi.
- d. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi transmigrasi kepada masyarakat.
- e. Usulan Penambahan PNS Sarjana diutamakan S1 Hukum untuk diusulkan mengikuti diklat fungsional mediator HI ke Kemnaker RI.
- f. Validasi data perusahaan dan jumlah tenaga kerja melalui kegiatan monev dan validasi data perusahaan dengan sistem jempuit bola.
- g. Dilakukan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi dan apresiasi terhadap perusahaan yang telah berkomitmen dalam melaksanakan hubungan industrial yang harmonis serta penerapan K3 di Perusahaan.
- h. Melakukan sosialisasi OSS pada kalangan pelaku usaha, masyarakat umum, baik melalui temu langsung, media sosial, media masa, papan pengumuman (billboard) dan menyediakan helpdesk di ruang pelayanan PTSP.
- i. Melakukan pelayanan perizinan keliling di kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kota.

- j. Menyatukan seluruh pelayanan publik dalam satu gedung Mal Pelayanan Publik yang akan direalisasikan Tahun 2020.
- k. Menambah jumlah loket untuk pelayanan perizinan OSS dan menambah jumlah loket pelayanan komitmen perizinan OSS pada Mal Pelayanan Publik di Tahun 2020.
- l. Melakukan pemetaan potensi, peluang dan project investasi sebagai bahan promosi serta mengikuti forum bisnis agar lebih fokus dengan calon investor.
- m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan serta pendampingan terhadap pelaku usaha dalam penyampaian LKPM.

2.11 KINERJA PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menerakan OSS (Online Single Submission). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018, OSS (Online Single Submission) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dimulai dengan pengendalian, pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengajukan izin usaha dan izin komersial/operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan memenuhi persyaratan dan komitmen. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Dokumen Elektronik tersebut disertai dengan Tanda Tangan Elektronik, yang berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan publik adalah pedoman yang dipakai oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha. Adapun standar pelayanan publik meliputi sebagai berikut :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka waktu penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pekerja
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Tahun 2015. Kemudian tahun 2017, standar pelayanan telah menggunakan ISO yang terbaru yaitu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan dunia usaha. Adapun manfaat penerapan ISO 9001:2015 adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pedoman kerja yang berstandar, sehingga lebih efektif dan efisien
- b. Senantiasa melakukan inovasi dan perubahan yang lebih baik
- c. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan
- d. Meningkatkan citra organisasi serta meningkatkan investasi daerah

Berikut merupakan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2019 .

Tabel 2.6
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Tahun 2019

No	Kinerja Pelayanan Perizinan	Capaian Tahun 2019
1	2	3
a.	Nilai IKM	81,72 (B)

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Tuban

Nilai IKM Tahun 2019 tersebut mendapat predikat Baik (B) dengan nilai 81,72 yang berarti dalam pelaksanaan pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban telah dapat memuaskan masyarakat.

Adapun bentuk fasilitasi / Prasarana informasi perizinan Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

1. Booklet,
2. Leaflet,
3. Papan Billboard,
4. Papan Pengumuman,
5. Media Pengaduan (Tapros)
6. Website

Berikut ini rekapitulasi perizinan yang diterbitkan di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 :

Tabel 2.7
Jumlah Izin yang Diterbitkan

NO.	URAIAN INDIKATOR KINERJA	REALISASI			
		TAHUN 2017	Tahun 2018	Tahun 2018 Setelah OSS	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6
1	Izin Usaha Industri	16	17	53	104
2	Izin Usaha Perdagangan	1072	735	1158	1247
3	Tanda Daftar Gudang	6	3	17	6
4	Tanda Daftar Perusahaan	1092	699	1308	1532
5	Tanda Daftar Perusahaan PKL	-	-	164	112
6	Izin Pemasangan Reklame Komersial	334	436	-	366
7	Izin Pemasangan Reklame Non Komersial	12	16	-	7
8	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	-	-	-	-
9	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	-	-	-	-
10	Rekomendasi IUTM	-	-	-	-
11	Izin Daya Tarik Wisata	-	-	-	-
12	Izin Kawasan Pariwisata	-	-	-	-
13	Izin Jasa Transportasi Wisata	-	-	-	-
14	Izin Jasa Perjalanan Wisata	3	9	-	-
15	Izin Jasa Makanan dan Minuman	15	6	-	-
16	Izin Penyediaan Akomodasi	-	5	-	-
17	Izin Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	-	-	-	-
18	Izin Jasa Informasi Pariwisata	-	-	-	-
19	Izin Jasa Konsultasi Pariwisata	-	-	-	-

20	Izin Jasa Pramuwisata				
21	Izin Wisata Tirta	5	1	-	-
22	Izin Panti Pijat (SPA)	-	-	-	-
23	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Izin Pusat Kebugaran dan Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga)	-	5	-	-
24	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	122	147	216	361
25	Izin Penyelenggaraan Klinik	2	8	-	4
26	Izin Rumah Sakit	-	1	-	2
27	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan Estetika	2	2	-	2
28	Izin Laboratorium Klinik Pratama	2	2	-	-
29	Izin Optikal	-	2	-	4
30	Izin Apotek	-	16	-	19
31	Izin Toko Obat	-	-	-	-
32	Laik Sehat Hotel	-	-	-	-
33	Laik Sehat Kolam Renang	-	-	-	-
34	Laik Sehat Pemandian Umum	-	-	-	-
35	Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran	-	-	-	-
36	Laik Sehat Jasa Boga / Catering	-	-	-	-
37	Izin Praktek Dokter / Bidan / Mantri Kesehatan	-	-	-	-
38	Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Apotek	-	-	-	-
39	Izin Operasional Menara Telekomunikasi	-	-	-	-
40	Rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi	-	15	-	-
41	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan	-	7	100	-
42	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Besar	-	4	-	-
43	Izin Jagal / Pengedar Daging (SLJ)	-	16	-	-
44	Izin Prinsip Penanaman Modal	-	-	-	-
45	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	-	-	-	-
46	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	-	-	-	-
47	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	477	-	610
48	Persetujuan Site Plan	-	25	-	21
49	Izin Pemanfaatan Tanah	-	1	-	5
50	Izin Lokasi	-	3	-	1
51	Surat Keterangan Tata Ruang	-	121	-	191
52	Izin Lingkungan	-	-	-	-

53	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	-	-	-
54	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Kabupaten	-	-	-	-
55	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	-	-	-	-
56	Izin Trayek Angkutan Pedesaan / Angkutan Kota	-	-	-	1
57	Izin Usaha Angkutan Barang dan Orang	-	-	-	-
58	Rekomendasi Andalalin	-	-	-	2
59	Izin Survei / Riset / PKL / KKN	-	-	-	183
60	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus	16	-	-	2
61	Izin Pendirian / Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			-	9
62	Kartu Pencari Kerja (AK 1)	6573	1988	-	1078
63	Izin Operasional Unit Penyuluhan, Pendataan dan Pendaftaran Calon TKI (UP3CTKI)			-	6
64	Rekomendasi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)			-	-
65	Rekomendasi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh (PPJP / B)			-	-
	JUMLAH	9.416	4.900	3.016	5.875

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

2.12 KINERJA BIDANG KETENAGAKERJAAN

Masalah utama Bidang Ketenagakerjaan sampai saat ini adalah semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja pada setiap tahun yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja (lowongan kerja) yang ada, hal ini jelas akan menambah jumlah pengangguran pada setiap tahunnya.

Agar tenaga kerja yang ada mampu bersaing sesuai dengan tuntutan keahlian atau skill yang dibutuhkan, maka diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga memiliki kompetensi yang tinggi untuk meraih kesempatan kerja yang ada, baik di tingkat lokal, antar wilayah, nasional maupun kesempatan kerja di luar negeri.

Adapun gambaran keadaan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban dari tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Data Tenaga Kerja Tahun 2018 – 2019

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Pencari Kerja (AK 1) (orang)	5.091	1.078
2.	Penempatan Tenaga Kerja (orang)	3.926	776

Sumber : DPM, PTSP dan TK Kab. Tuban, 2019

Dari jumlah pencari kerja yang ada di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2019 adalah 1.078 orang dan jumlah pencari kerja yang di tempatkan 776 orang atau dengan capaian kinerja 71,98 %.

BAB III PENUTUP

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban Tahun 2019 tentu sejalan dengan Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021, dan lebih detail dituangkan ke dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Tahun 2019 yang telah disusun sehingga laporan ini merupakan operasionalisasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Demikian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban tahun 2019 ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi bersama sehingga dapat tercapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TUBAN**

TADJUDIN TEBYO, SH, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600827 198603 1 013